

BAB 2

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI NASIONAL: STABILITAS TETAP TERJAGA, PERTUMBUHAN MENINGKAT

Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional mendukung kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Inflasi IHK terjaga dan berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan seluruh komponen inflasi yang tetap terkendali. Stabilitas sistem keuangan terjaga, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah. Digitalisasi ekonomi dan keuangan berlanjut meningkat pesat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan meningkat pada kisaran 4,9–5,7%, didukung dengan stabilitas perekonomian yang tetap kuat.





Ekonomi Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejala dan ketidakpastian global. *Pertama*, ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dengan stabilitas makroekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan pertumbuhan yang tetap tinggi. Pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 terus berlangsung dan semakin kuat. *Kedua*, koordinasi kebijakan yang kuat dan dengan berhati-hati, khususnya antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia mampu mendorong permintaan domestik dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. *Ketiga*, Indonesia juga terus memperkuat komitmen dalam melakukan transformasi ekonomi, melalui perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Perbaikan sektor-sektor ekonomi terus berlangsung dan memperkuat sisi penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan *keempat*, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang kuat di berbagai forum internasional, termasuk dalam sejumlah kerja sama dan lembaga internasional. Keberhasilan Keketuaan Indonesia pada G20 tahun 2022 diakui dunia dengan mendorong sejumlah agenda penting, termasuk penguatan koordinasi kebijakan fiskal-moneter global, kerja sama kesehatan, penyelesaian utang negara miskin, dan kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara. Di kawasan ASEAN, Keketuaan Indonesia tahun 2023 menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan integrasi kawasan.

Selama enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia mencatat kinerja yang kuat, termasuk salah satu yang terbaik di antara negara EMEs. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2019 secara konsisten bertahan di atas 5%, kecuali pada masa pandemi COVID-19 (Tabel 2.1.). Bahkan, kontraksi ekonomi akibat pandemi termasuk yang paling ringan dibandingkan dengan negara-negara lain. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pun tetap terjaga dengan baik. Inflasi tetap terkendali rendah, dengan rerata di bawah 3% selama periode 2019-2024, dan nilai tukar Rupiah terjaga

stabil, dengan komitmen yang tinggi kebijakan moneter Bank Indonesia. Defisit fiskal terjaga rendah di bawah 3% dari PDB, kecuali pada periode puncak COVID-19 tahun 2020 dan 2021 yang kemudian kembali melakukan konsolidasi fiskal secara cepat. Kinerja eksternal juga terjaga baik, dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dan bahkan mencatat surplus pada 2021 dan 2022, didukung penguatan kinerja ekspor seiring keberhasilan hilirisasi sumber daya alam. Demikian pula, stabilitas sistem keuangan terjaga dengan kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) perbankan yang tinggi di atas 20%. Pertumbuhan kredit yang solid turut mendukung pembiayaan sektor produktif dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga disertai dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat dan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia mendukung kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya tahan. Kebijakan fiskal Pemerintah yang berhati-hati dengan defisit di bawah 3% PDB ditempuh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial untuk menopang konsumsi masyarakat. Sementara itu, bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh secara optimal untuk stabilitas dan pertumbuhan, dengan kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/ pembiayaan perbankan, dan kebijakan sistem pembayaran untuk digitalisasi ekonomi-keuangan nasional yang inklusif dan efisien. Berbagai kebijakan transformasi struktural juga terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor, termasuk transportasi, perairan, perumahan, dan telekomunikasi. Reformasi kelembagaan dan regulasi ditempuh melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang



Tabel 2.1. Kinerja Ekonomi Indonesia: 2019–2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	%yoy	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05*	5,03**
Transaksi Berjalan	%PDB	-2,71	-0,42	0,30	1,00	-0,15	-0,62*
Defisit Fiskal	%PDB	-2,20	-6,14	-4,57	-2,35	-1,61	-2,30
Inflasi IHK	%yoy	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Nilai Tukar Rupiah	IDR/USD (rerata)	14.139	14.525	14.296	14.873	15.247	15.841
Suku bunga BI-Rate	%	5,00	3,75	3,50	5,50	6,00	6,00
Kredit Perbankan	%	6,08	-2,41	5,24	11,35	10,38	10,39
Modal Perbankan (CAR)	%	23,31	23,81	25,67	25,63	27,66	26,65

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat ketahanan, perluasan jasa keuangan, dan efisiensi sistem keuangan nasional. Ke depan, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat dan diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kinerja positif ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2025, dan diperkirakan akan lebih tinggi pada 2026 dan 2027. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II dan III 2025 lebih baik dari prakiraan, yaitu sebesar 5,12% (yoy) dan 5,04% (yoy), lebih tinggi dari 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025 (Tabel 2.2.). Kinerja ekspor nonmigas meningkat dipengaruhi *front-loading* ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur, khususnya komoditas minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*, CPO) ke India seiring penurunan bea impor. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh permintaan domestik, khususnya investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring tingginya mobilitas masyarakat, meskipun perlu terus diperkuat di tengah menurunnya ekspektasi konsumen khususnya pada kelompok menengah ke bawah serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Ke depan, ekonomi

Indonesia akan terus menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan berada di kisaran 4,7–5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*) dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi fiskal, realisasi belanja Pemerintah sesuai APBN perlu dipercepat untuk mendorong permintaan domestik, baik implementasi program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), maupun proyek prioritas Pemerintah terkait program ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025. Dari sisi penawaran, implementasi hilirisasi sumber daya alam dan reformasi struktural perlu dipercepat untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja tinggi. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, peningkatan insentif makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.



Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Sisi Pengeluaran (% , yoy)

Komponen	2023*	2024**	2025***			2025 ^p	2026 ^p	2027 ^p
			I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,03	4,87	5,12	5,04	4,7-5,5	4,9-5,7	5,1-5,9
- Konsumsi Swasta	4,94	5,11	4,91	5,04	4,87	4,6-5,4	4,9-5,7	4,9-5,7
- Konsumsi Pemerintah	3,02	6,61	-1,37	-0,33	5,49	2,0-2,8	7,2-8,0	5,9-6,7
- Investasi	3,76	4,61	2,12	6,99	5,04	4,8-5,6	5,6-6,4	6,4-7,2
- Ekspor	1,34	6,51	6,44	10,95	9,91	7,7-8,5	4,9-5,7	5,3-6,1
- Impor	-1,60	7,95	4,00	11,48	1,18	6,5-7,3	5,0-5,8	5,8-6,6

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^pProyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS, Bank Indonesia

Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor-sektor padat modal, sementara sektor padat karya masih memerlukan dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Kinerja positif terutama terlihat pada sektor-sektor berorientasi ekspor dan sektor hilirisasi sumber daya alam, seperti Industri Pengolahan, yang mencatat pertumbuhan relatif tinggi seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah di dalam negeri (Tabel 2.3.). Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, seperti Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan, turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi digitalisasi, antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi, juga mencatatkan pertumbuhan yang semakin tinggi. Berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pun terus menunjukkan penguatan kinerja. Perkembangan lintas lapangan usaha tersebut menggambarkan proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19 yang semakin kuat. Pemulihan awal terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh efek memar (*scarring effect*) selama periode 2021–2022, kemudian berlanjut pada sektor-sektor berorientasi ekspor pada periode 2022–2024, dan kini semakin bergeser menuju sektor-sektor yang mendorong penguatan permintaan domestik.

Ke depan, sektor-sektor seperti Pertanian, Perdagangan—khususnya ritel, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi terutama terkait digitalisasi, serta berbagai sektor jasa lainnya, perlu terus diperkuat. Sektor-sektor tersebut tidak hanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Keseimbangan pola pertumbuhan antara sektor padat modal dan padat karya sangat penting untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik didukung oleh kinerja perekonomian di hampir seluruh wilayah. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Jawa sebesar 5,17% (yoy), diikuti Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 4,96% (yoy), Sumatra sebesar 4,90% (yoy), Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebesar 4,71% (yoy), dan Kalimantan sebesar 4,70% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, lebih baiknya pertumbuhan di wilayah Jawa didorong oleh penambahan kapasitas industri dan peningkatan produksi pertanian. Di Kawasan Timur Indonesia, hilirisasi mineral terutama nikel, bauksit, dan tembaga menopang pertumbuhan industri di wilayah tersebut. Dari sisi pengeluaran, di tengah konsumsi rumah tangga di mayoritas wilayah yang masih di bawah 5%, investasi menjadi penopang utama terutama investasi industri di Kawasan Investasi (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus



Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Sisi Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektor	2023*	2024**	2025***			2025 ^p	2026 ^p	2027 ^p
			I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,03	4,9	5,1	5,0	4,7 - 5,5	4,9 - 5,7	5,1 - 5,9
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	0,67	10,5	1,7	4,9	4,4 - 5,2	5,2 - 6,0	5,4 - 6,2
Pertambangan dan Penggalian	6,12	4,90	-1,2	2,0	-2,0	1,0 - 1,8	2,8 - 3,6	4,0 - 4,8
Industri Pengolahan	4,64	4,43	4,5	5,7	5,5	5,1 - 5,9	5,0 - 5,8	4,9 - 5,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	4,77	5,1	0,9	2,9	3,0 - 3,8	4,5 - 5,3	4,1 - 4,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,90	1,56	0,2	0,8	3,3	2,2 - 3,0	4,3 - 5,1	4,6 - 5,4
Konstruksi	4,91	7,02	2,2	5,0	4,2	4,7 - 5,5	7,5 - 8,3	7,1 - 7,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,85	4,86	5,0	5,4	5,5	5,0 - 5,8	5,3 - 6,1	5,1 - 5,9
Transportasi dan Pergudangan	13,96	8,69	9,0	8,5	8,6	8,1 - 8,9	10,8 - 11,6	10,4 - 11,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,00	8,56	5,8	8,0	8,4	7,4 - 8,2	6,4 - 7,2	6,2 - 7,0
Informasi dan Komunikasi	7,59	7,57	7,7	7,9	9,7	7,5 - 8,3	8,0 - 8,8	9,5 - 10,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	4,74	4,0	3,2	0,8	4,9 - 5,7	7,6 - 8,4	7,5 - 8,3
Real Estat	1,43	2,50	2,9	3,7	4,0	3,5 - 4,3	3,0 - 3,8	2,8 - 3,6
Jasa Perusahaan	8,24	8,38	9,3	9,3	9,9	8,3 - 9,1	6,1 - 6,9	5,9 - 6,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1,51	6,40	4,8	4,7	4,3	3,9 - 4,7	5,2 - 6,0	4,6 - 5,4
Jasa Pendidikan	1,77	3,75	5,0	1,4	10,6	4,1 - 4,9	6,4 - 7,2	7,1 - 7,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	8,11	5,8	3,8	6,8	5,3 - 6,1	4,0 - 4,8	3,9 - 4,7
Jasa Lainnya	10,52	9,80	9,8	11,3	9,9	8,7 - 9,5	7,0 - 7,8	6,7 - 7,5

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^pProyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS, Bank Indonesia

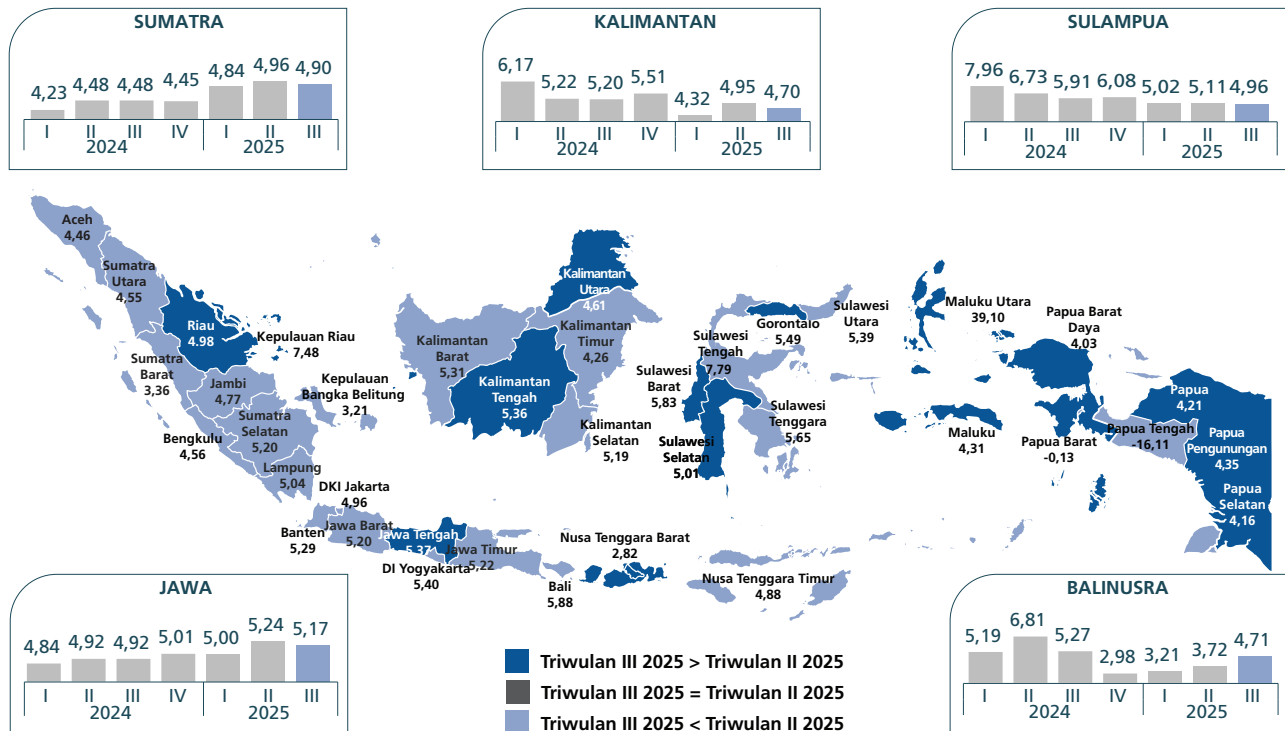
(KEK) di Jawa (Batang, Kendal, Gresik) dan Sulampua (hilirisasi nikel). Dari sisi ekspor, kinerja ekspor terutama didukung oleh komoditas logam di Jawa, CPO dari Sumatra, dan ekspor besi baja di Sulampua, sementara ekspor batu bara dari Kalimantan terkena dampak penurunan permintaan luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2025, perekonomian wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8-5,2%, 4,7-5,5%, 4,3-5,1%, 4,2-5,0%, dan

4,2-4,8%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada 2026 diperkirakan akan meningkat masing-masing menjadi 4,9-5,3%, 4,7-5,5%, 4,6-5,4%, 5,5-6,3%, dan 5,6-6,4% (Gambar 2.1.).

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang terjaga sehat. Kinerja transaksi berjalan hingga triwulan III 2025 cukup baik, didukung surplus neraca perdagangan yang besar, mencapai 40 miliar



Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial Triwulan III 2025 (% , yoy)

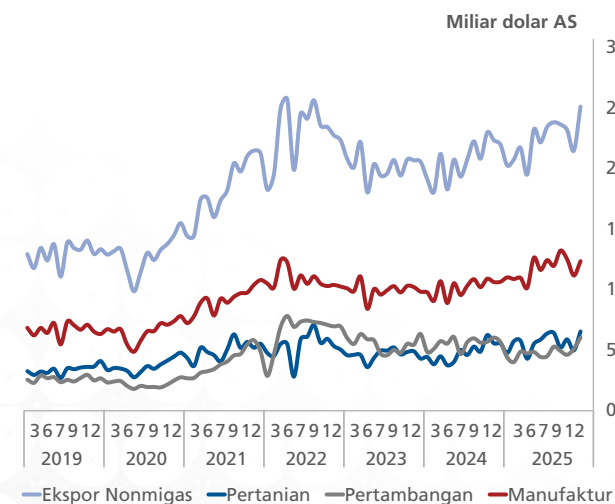


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

dolar AS. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor nonmigas Indonesia, baik manufaktur, pertanian, maupun pertambangan, tetap tumbuh tinggi sejalan dengan antisipasi eksportir terhadap tarif resiprokal AS (Grafik 2.1.). Demikian juga ekspor pertambangan komoditas hasil hilirisasi sumber daya alam terus meningkat tinggi, khususnya nikel dan tembaga (Grafik 2.2.). Untuk keseluruhan tahun 2025,

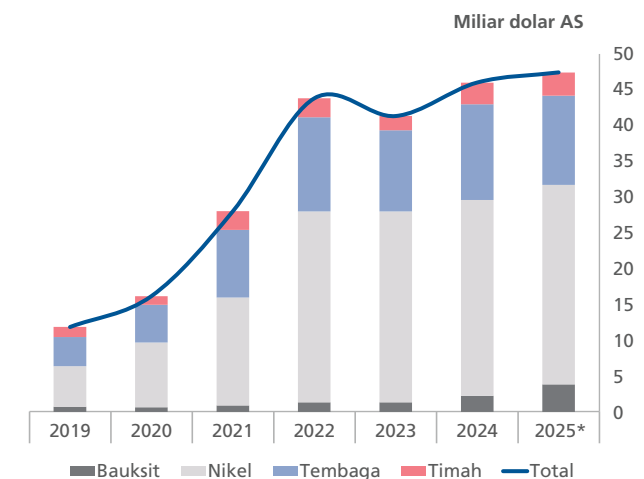
transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni sekitar defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari PDB. Sementara itu, tingginya gejolak global berdampak negatif pada kinerja transaksi modal dan finansial dengan terjadinya *net outflows* investasi portofolio, di tengah tetap positifnya penanaman modal langsung. Hingga akhir 2025, investasi portofolio tercatat *net outflows* sebesar

Grafik 2.1. Ekspor Nonmigas Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diolah

Grafik 2.2. Ekspor Produk Hilirisasi Minerba



Keterangan: *Data s.d November 2025 (Kumulatif)

Sumber: DJBC, diolah



6,8 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar AS, meningkat dari 155,7 miliar dolar AS pada akhir tahun 2024. Posisi cadangan devisa dimaksud setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Tabel 2.4.). Pada tahun 2026, NPI diperkirakan akan kembali mencatat surplus dengan posisi cadangan devisa yang meningkat. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9–0,1% PDB,

didukung oleh kinerja ekspor yang tetap baik termasuk dari hasil positif hilirisasi sumber daya alam. Neraca modal dan finansial diperkirakan akan surplus dari penanaman modal asing dan kembali masuknya aliran portofolio sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga terlihat pada terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global dengan komitmen tinggi Bank Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan tarif sepihak yang tinggi oleh Presiden Trump telah

Tabel 2.4. Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar Dolar AS)

Komponen	2021	2022	2023	2024*					2025		
				I	II	III	IV	Total	I*	II*	III**
Transaksi Berjalan	3,5	13,2	-2,0	-2,4	-3,0	-2,0	-1,3	-8,7	-0,2	-2,7	4,0
A. Barang	43,8	62,7	46,3	9,3	10,0	9,2	11,3	39,8	13,0	10,6	16,1
- Ekspor, fob	232,8	292,5	257,7	61,9	62,3	67,5	71,3	263,1	65,9	68,0	73,9
- Impor, fob	-189,0	-229,9	-211,4	-52,6	-52,3	-58,3	-60,0	-223,3	-52,9	-57,4	-57,8
a. Non-migas	57,8	89,8	67,8	15,1	15,2	14,7	17,8	62,8	18,8	15,7	20,9
b. Migas	-13,0	-24,8	-19,9	-5,5	-4,6	-4,4	-5,1	-19,6	-4,7	-4,2	-4,8
B. Jasa-jasa	-14,6	-20,0	-17,7	-4,2	-5,0	-4,2	-5,2	-18,6	-5,4	-5,2	-4,3
C. Pendapatan Primer	-32,0	-35,3	-36,0	-8,8	-9,4	-8,5	-9,0	-35,9	-9,4	-9,8	-9,4
D. Pendapatan Sekunder	6,3	5,8	5,4	1,3	1,4	1,5	1,6	5,9	1,6	1,7	1,7
Transaksi Modal dan Finansial	12,5	-9,2	9,8	-2,4	2,5	8,0	9,5	17,6	-0,4	-3,6	-8,1
1. Investasi Langsung	17,3	18,1	14,4	4,8	2,3	5,1	3,6	15,9	2,6	3,5	2,5
2. Investasi Portofolio	5,1	-11,6	2,2	-2,1	3,2	9,8	-2,5	8,3	1,0	-8,1	-7,1
3. Investasi Lainnya	-10,2	-15,6	-6,9	-4,7	-3,4	-7,2	8,4	-6,9	-4,2	1,0	-3,4
Neraca Keseluruhan	13,5	4,0	6,3	-6,0	-0,6	5,9	7,9	7,2	-0,8	-6,7	-6,4
Memorandum:											
- Cadangan Devisa	144,9	137,2	146,4	140,4	140,2	149,9	155,7	155,7	157,1	152,6	148,7
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	7,8	5,9	6,5	6,2	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,1	6,0
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	1,0	-0,1	-0,7	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	0,0	-0,8	1,1

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara



menyebabkan aliran keluar portofolio asing dan depresiasi nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Rupiah sempat mengalami tekanan tinggi di pasar *forward* luar negeri (*off-shore Non-Deliverable Forward*, NDF) setelah pengumuman tarif AS pada awal April 2025. Untuk memperkuat stabilisasi Rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara intensif dan tanpa henti baik di pasar Asia, Eropa, dan AS³. Intervensi *off-shore* NDF dimaksudkan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di pasar domestik yang terus dilakukan dengan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga dioptimalkan, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan komitmen kuat Bank Indonesia tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga Agustus 2025 tercatat sekitar Rp16.300 per dolar AS, menguat dibandingkan dengan awal April 2025 sebesar Rp16.865 per dolar AS (tanggal 8 April 2025) setelah pengumuman tarif resiprokal AS (Grafik 2.3.). Namun tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali besar sejak akhir Agustus 2025, baik karena faktor global seperti penurunan FFR yang dinilai kurang besar (*less dovish*) dan *government shutdown* di AS, maupun faktor domestik seperti kerusakan

3 Penjelasan lebih rinci mengenai *Non-Deliverable Forward* (NDF) dapat dilihat pada Boks 2.1. Inovasi Intervensi Nilai Tukar pada Pasar *Non-Deliverable Forward* (NDF) *Offshore*.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia didukung oleh terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global

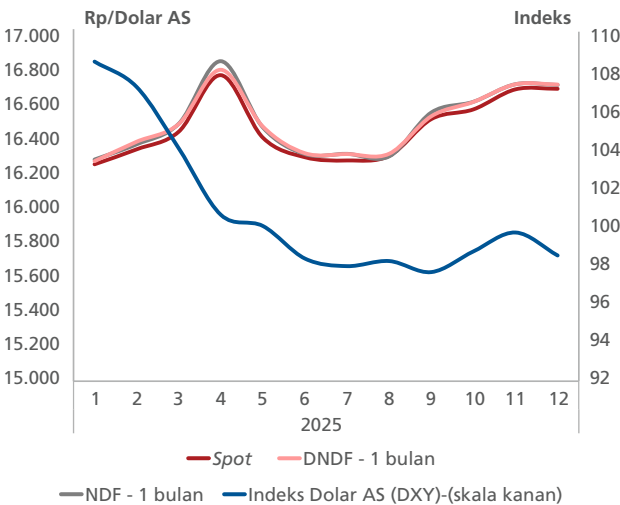
sosial dan kekhawatiran pasar atas melebarnya defisit fiskal. Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024, dengan rerata Rp16.466 per dolar AS selama tahun 2025. Secara umum, perkembangan Rupiah relatif stabil jika dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS (Grafik 2.4.). Selain ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi, stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi yang rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy) didukung oleh tetap terjaganya berbagai komponen inflasi (Grafik 2.5.). Inflasi inti terjaga





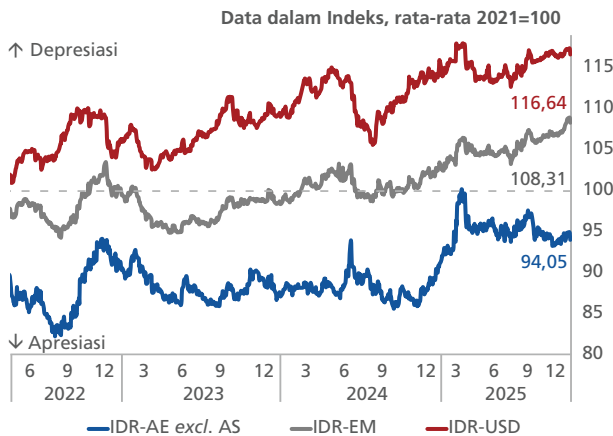
Grafik 2.3. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Dolar AS: Spot, NDF, DNDF



Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

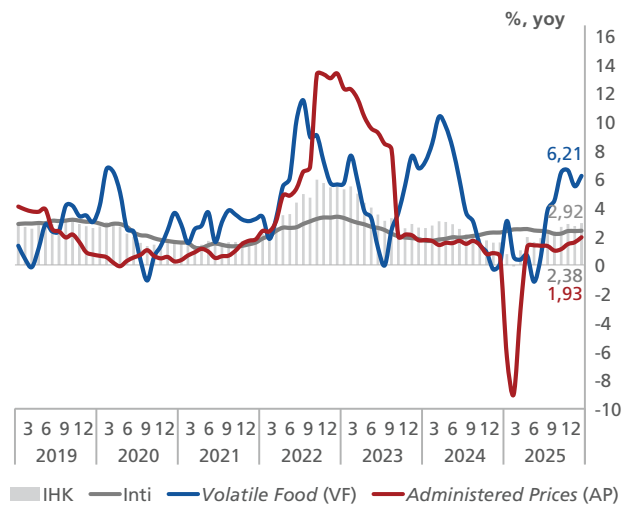
rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi *volatile food* (VF) relatif terkendali sebesar 6,21% (yoy), ditopang oleh upaya untuk terus menjaga ketersediaan pasokan pangan serta didukung eratny sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan

Grafik 2.4. Indeks Nilai Tukar Rupiah vs Negara EMEs dan Negara Maju Lainnya



Keterangan: Menggunakan data harian; Data per akhir Des'25
Indeks komposit berdasarkan bobot perdagangan: SGD (13%), CNY (52%), INR (11%), KRW (9%), THB (7%), MYR (9%)
Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

Grafik 2.5. Inflasi IHK, Inti, VF, dan AP



Sumber: BPS, diolah

penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 1,93% (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah⁴. Melalui Kantor Pusat dan 46 kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah, Bank Indonesia mendukung kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui program-program unggulan untuk peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, Kerja sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, pasar murah, digitalisasi data, serta koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027 dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan eratny koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah.

Stabilitas moneter dan pasar keuangan terjaga dengan proses penurunan suku bunga yang terus berlangsung sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia. Sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah penurunan 25 bps pada September 2024, Bank Indonesia selama tahun 2025 kembali menurunkan

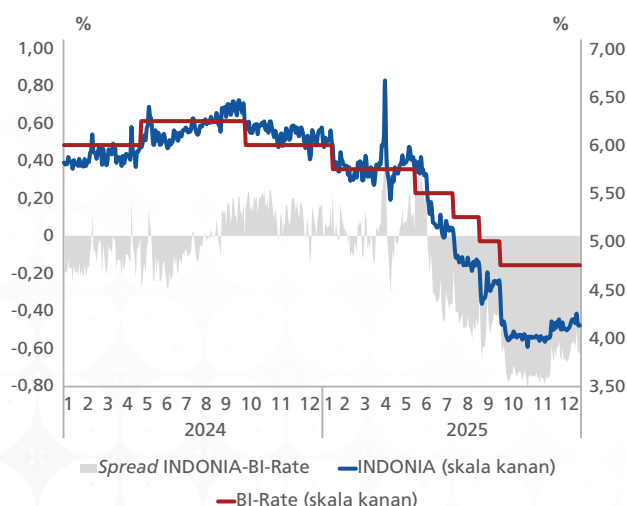
4 Penjelasan lebih rinci mengenai sinergi pengendalian inflasi dan capaian inflasi 2025 dapat dilihat pada Boks 2.2. Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Menjaga Stabilitas Harga.



BI-Rate sebanyak lima kali yakni pada Januari 2025, Mei 2025, Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps. Dengan demikian, Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 150 bps menjadi 4,75%, atau level terendah sejak tahun 2022, dan mempertahankan BI-Rate pada Oktober hingga Desember 2025. Seiring dengan penurunan BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga pasar uang, Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA), turun sebesar 190 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,13% pada 31 Desember 2025 (Grafik 2.6.). Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 231 bps, 230 bps, dan 234 bps sejak awal 2025 menjadi 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025, sehingga mendukung kebijakan moneter yang ekspansif. Imbal hasil SBN untuk tenor 2

tahun menurun sebesar 197 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,99% pada 31 Desember 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 119 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,07% pada 31 Desember 2025. Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat dan karenanya perlu dipercepat. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian *special rate* kepada deposan besar yang mencapai 26,67% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025 (Grafik 2.7.). Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan tersebut, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit, untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Grafik 2.6. Suku Bunga BI-Rate dan INDONIA

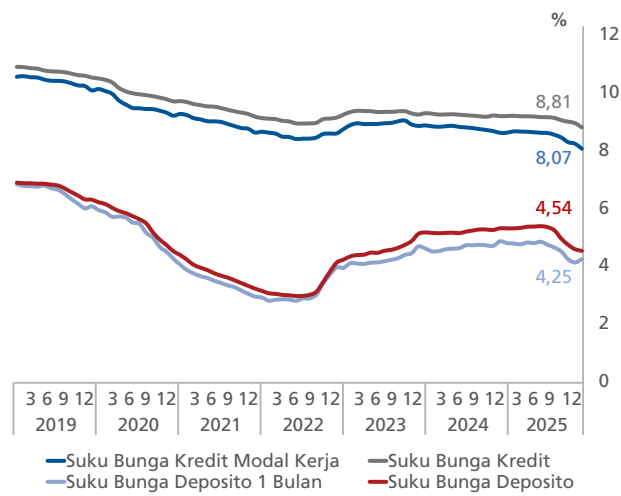


Sumber: Bank Indonesia

Stabilitas moneter juga didukung dengan ekspansi operasi moneter Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menurunkan struktur suku bunga instrumen moneter dan *swap* valas untuk mendukung ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan



Grafik 2.7. Suku Bunga Perbankan



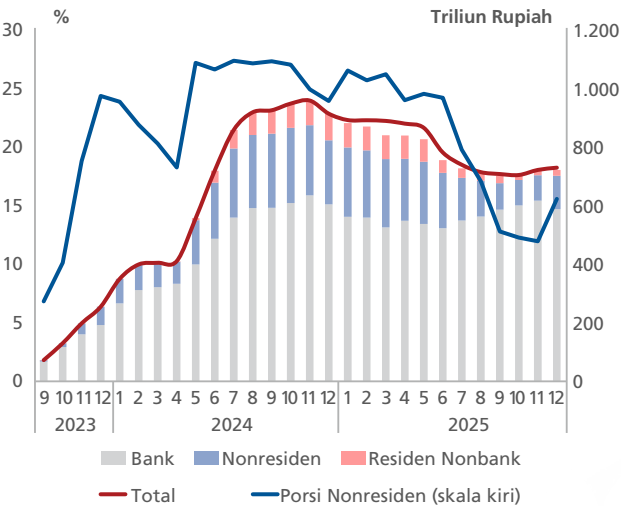
Sumber: Bank Indonesia

suku bunga deposito dan kredit perbankan. Ekspansi likuiditas moneter juga dilakukan Bank Indonesia dengan penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Posisi instrumen moneter SRBI turun sebesar Rp186,07 triliun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada 31 Desember 2025 (Grafik 2.8.). Selain itu, Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp332,14 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Untuk mendorong

pendalaman pasar uang, pengembangan produk, harga, pelaku, dan infrastruktur dalam *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) terus dilakukan Bank Indonesia bersama Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO). Hasilnya sangat membanggakan, dengan peningkatan rerata harian transaksi dari hanya Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp50,8 triliun pada 2025 di pasar uang, dan dari Rp4,8 miliar dolar AS menjadi 10,13 miliar dolar AS dalam periode yang sama di pasar valas. Implementasi Dealer Utama sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan *repurchase agreement* (repo) antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI di pasar sekunder meningkat dari rerata 73% pada 2024 menjadi 84% pada 2025 (s.d Desember 2025)-(Grafik 2.9.).

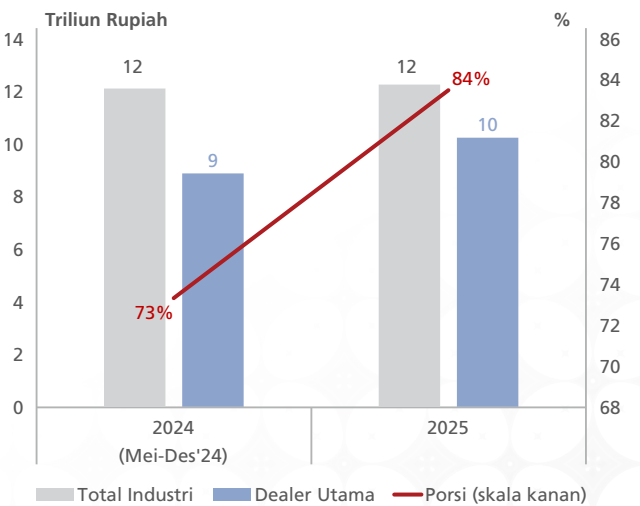
Kebijakan moneter longgar yang ditempuh Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga dan ekspansi moneter mendorong kenaikan jumlah uang beredar dan longgarnya likuiditas perbankan. Pertumbuhan uang Primer (M0) *Adjusted*, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makprudensial (KLM), tercatat 16,8% (yoy) pada Desember 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 11,4% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, kenaikan

Grafik 2.8. Posisi SRBI: Bank, Nonresiden, Residen Nonbank



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.9. Peran Dealer Utama dalam Transaksi SRBI Sekunder

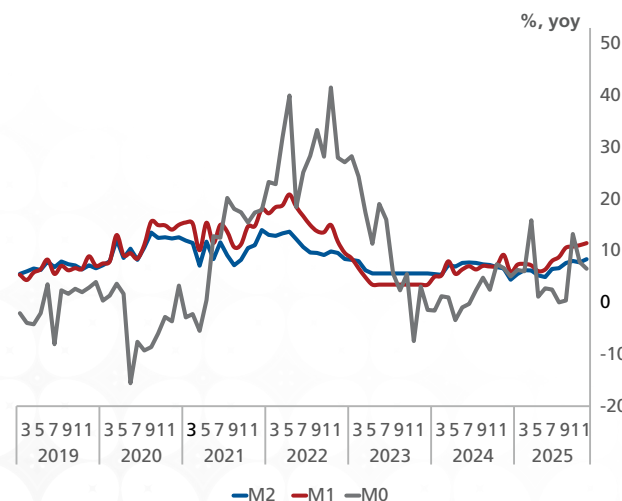


Sumber: Bank Indonesia



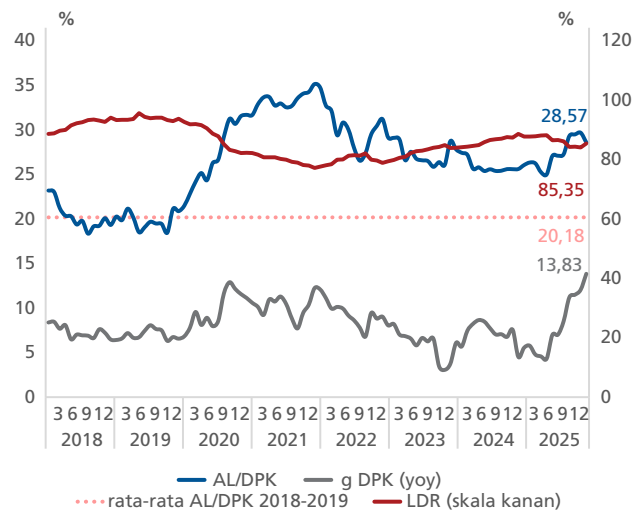
M0 *Adjusted* ini dipengaruhi oleh ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia dan ekspansi keuangan Pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Government, NCG*). Pelonggaran kebijakan moneter juga berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang meningkat dari 5,46% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 8,3% (yoy) pada November 2025 (Grafik 2.10.). Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 11,4% (yoy) pada November 2025, sejalan dengan pertumbuhan uang kartal dari 10,30% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 14,6% (yoy) pada November 2025. Dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Asset, NFA*). Ke depan, jumlah uang yang beredar diperkirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah. Sementara itu, longgarnya likuiditas perbankan yang diukur dengan rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada pada level yang tinggi. Kondisi likuiditas perbankan yang memadai juga terlihat dari rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR), yang mencerminkan akumulasi dana yang belum disalurkan ke kredit. Per Desember 2025, rasio AL/DPK dan LDR perbankan tercatat masing-masing sebesar 28,57% dan 85,35%, dan karenanya secara keseluruhan menunjukkan likuiditas perbankan yang longgar (Grafik 2.11.).

Grafik 2.10. Likuiditas Perekonomian



Sumber: Bank Indonesia

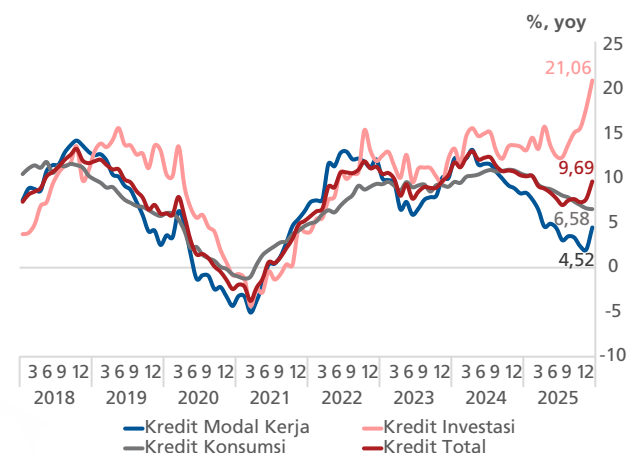
Grafik 2.11. Likuiditas Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan tumbuh kuat untuk mendukung pembiayaan perekonomian. Pertumbuhan kredit tercatat 9,69% (yoy) pada Desember 2025. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit investasi meningkat menjadi sebesar 21,06% (yoy). Kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih berada dalam tren melambat masing-masing sebesar 4,52% dan 6,58%(yoy), dengan perbaikan pada kredit modal kerja (Grafik 2.12.). Berdasarkan segmennya, kredit korporasi masih tumbuh baik sebesar 18,33% (yoy), sementara pertumbuhan kredit komersial, konsumsi, dan

Grafik 2.12. Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi

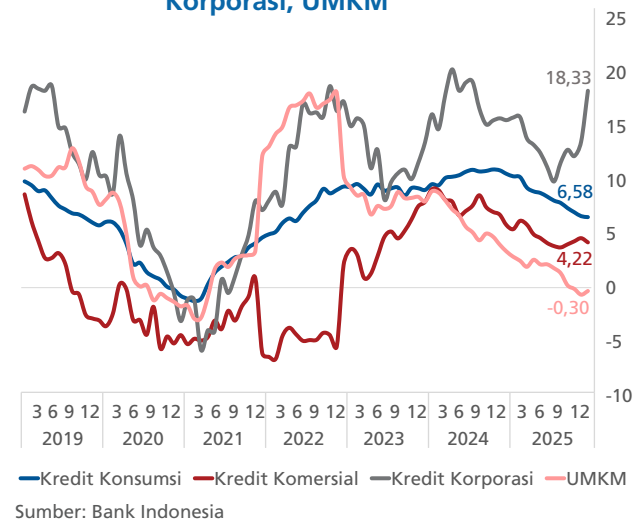


Sumber: Bank Indonesia



Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurun masing-masing menjadi 4,22% (yoy), 6,58% (yoy), dan -0,30% (yoy)-(Grafik 2.13.). Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit ditopang sektor Listrik, Gas, dan Air (35,15%), Konstruksi (27,85%), dan Jasa Sosial (18,53%). Pertumbuhan kredit sektor Industri (5,95%), Perdagangan (4,04%), dan sektor-sektor lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Tabel 2.5.). Penyaluran kredit/pembiayaan dipengaruhi sikap kehati-hatian perbankan dan permintaan kredit yang belum kuat. Pada sisi penawaran, minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya masih cukup baik sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang cukup longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM seiring dengan peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai, ditopang oleh DPK yang tumbuh sebesar 13,83 % (yoy) pada Desember 2025 seiring ekspansi keuangan Pemerintah, termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif

Grafik 2.13. Pertumbuhan Kredit per Segmen: Kredit Konsumsi, Komersil, Korporasi, UMKM



kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Sementara pada sisi permintaan, belum kuatnya permintaan kredit dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih *wait and see*, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Perkembangan ini tecermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (*undisbursed*

Tabel 2.5. Kredit per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Growth (% , yoy)				Kontribusi (% , yoy)			
	Des-22	Des-23	Des-24	Des-25	Des-22	Des-23	Des-24	Des-25
Labor Intensive Sectors								
Jasa Sosial	18,23	35,06	21,15	18,53	0,56	1,14	0,84	0,81
Konstruksi	4,26	(0,37)	0,02	27,85	0,28	(0,02)	0,00	1,41
Perdagangan	6,61	8,77	4,27	4,04	1,25	1,59	0,77	0,68
Pertanian	10,10	8,45	4,84	14,20	0,76	0,63	0,35	0,99
Capital Intensive Sectors								
Industri	12,19	4,72	9,56	5,95	2,01	0,78	1,51	0,93
Jasa Dunia Usaha	26,60	16,98	13,09	10,30	2,26	1,64	1,34	1,08
Transportasi	2,22	19,28	19,16	11,77	0,12	0,94	1,01	0,67
Pertambangan	54,35	22,36	28,59	7,17	1,45	0,83	1,17	0,34
LGA	1,64	13,33	19,75	35,15	0,05	0,34	0,51	0,99
Lainnya								
Lain-lain	9,55	9,10	10,61	6,58	2,68	2,51	2,89	1,80
	11,35	10,38	10,39	9,69	11,35	10,38	10,39	9,69

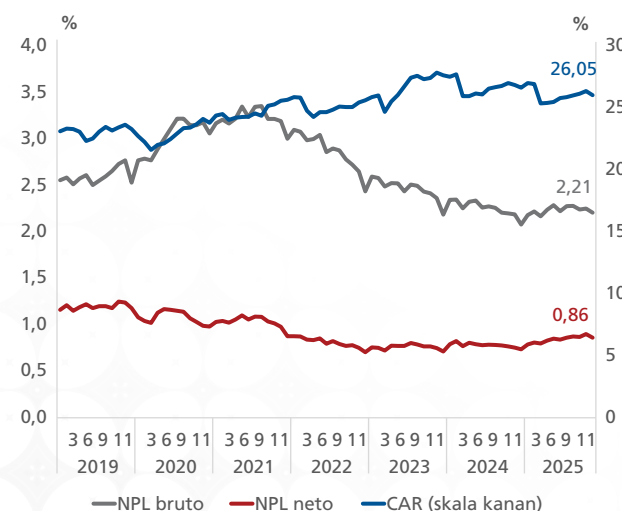
Sumber: Bank Indonesia



loan) pada Desember 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Industri, Pertambangan, Jasa Dunia Usaha, dan Perdagangan, serta dengan jenis kredit modal kerja. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga.

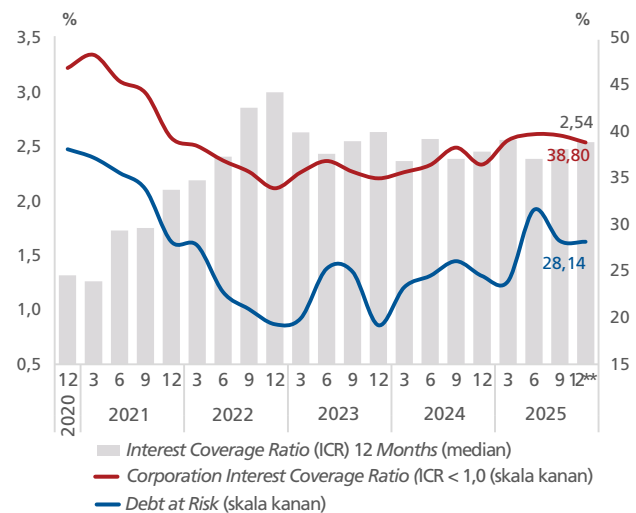
Stabilitas sistem keuangan terjaga didukung kecukupan permodalan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada November 2025 tercatat sebesar 26,05%, tergolong kuat untuk menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit (Grafik 2.14.). Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan pada November 2025 terjaga rendah, sebesar 2,21% (bruto) dan 0,86% (neto). Terjaganya risiko kredit tecermin pula pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang terus menurun. Perbankan pada umumnya telah membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang cukup atas risiko kreditnya. Hasil *stress test* menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat, tecermin pada ketahanan permodalan CAR industri yang masih di atas 25% pada berbagai skenario. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar (*Interest*

Grafik 2.14. CAR dan NPL Perbankan



Sumber: OJK dan Bank Indonesia

Grafik 2.15. Interest Coverage Ratio (ICR)



Sumber: Bank Indonesia

Coverage Ratio, ICR) dan profitabilitas korporasi yang terjaga (Grafik 2.15.). Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan semakin meningkatnya kinerja perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2025 meningkat 31,04% (yoy) sehingga mencapai Rp65.069,78 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 30,44% (yoy) mencapai 1.358,65 juta transaksi. Transaksi *digital payment* tercatat 14,26 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 39,21% (yoy). Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 139,99% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan jumlah *merchant* 42,75 juta⁵. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun (Tabel 2.6). Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan struktur yang membaik. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem

⁵ Penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan transaksi QRIS dapat dilihat pada Boks 2.3. Akselerasi Transaksi QRIS: Mendorong Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Inklusi Keuangan.



Tabel 2.6. Prakiraan Sistem Pembayaran Indonesia 2025–2027

Transaksi		Pertumbuhan (%)				Nominal/Volume			
		2024	2025*	2026*	2027*	2024	2025*	2026*	2027*
I. Nontunai									
1. Digital Payment	Rp Triliun (Nom)	19,3	10,8	12,4	14,8	70.890,4	78.563,1	88.310,7	101.410,3
	Juta (Vol)	40,7	34,1	30,0	23,9	36.659,2	49.167,8	63.925,9	79.206,7
2. QRIS	Rp Triliun (Nom)	191,6	125,3	109,2	82,4	659,9	1.486,80	3.110,6	5.674,3
	Juta (Vol)	191,7	146,4	10,6	10,6	6.239,7	15.374,2	17.000,0	18.797,7
3. BI-FAST	Rp Triliun (Nom)	54,7	36,6	26,7	20,3	8.913,8	12.176,2	15,429,5	18.568,7
	Juta (Vol)	62,4	45,2	29,8	25,2	3.430,0	4.862,6	6.312,5	7.902,9
4. Sistem BI-RTGS	Rp Triliun (Nom)	12,8	19,1	11,2	9,0	178.920,3	149.344,0	166.015,0	180.967,0
	Juta (Vol)	3,2	0,9	0,3	0,1	10,2	10,3	10,3	10,3
II. Tunai									
Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)	Rp Triliun (Nom)	9,3	8,1	7,2	7,3	1.204,5	1.273,2	1.301,9	1.497,2

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas. Sejalan dengan nontunai, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk menjangkau daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Capaian kinerja positif perekonomian domestik tersebut merupakan hasil dari eratnya koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal Pemerintah tetap dijalankan secara berhati-hati, dengan defisit fiskal tahun 2025 sebesar 2,92% dari PDB, masih di bawah ambang batas

defisit maksimal 3,0% PDB. Kebijakan moneter Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan Bank Indonesia juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, stimulus diberikan melalui program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, dan

Capaian kinerja positif perekonomian domestik merupakan hasil dari eratnya koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional



percepatan realisasi belanja kementerian/ lembaga. Selain itu, Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai program Asta Cita, sejalan dengan pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional yang berfokus pada ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) telah disalurkan insentif likuiditas sebesar Rp388,06 triliun hingga minggu pertama Desember 2025 kepada perbankan guna mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, mencakup (i) sektor mencakup (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk sektor

ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Sinergi kebijakan juga diperkuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional, termasuk melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Koordinasi di dalam KSSK juga ditempuh untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendukung peran sektor keuangan dalam pembiayaan perekonomian bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.



Boks

2.1.

Inovasi Intervensi Nilai Tukar pada Pasar *Non-Deliverable Forward (NDF) Offshore*

Perkembangan pasar keuangan global banyak memengaruhi nilai tukar Rupiah, meskipun saat pasar domestik sedang mengikuti periode libur nasional. Hal ini tecermin pada libur panjang Lebaran 2025 saat terjadi pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS (*Liberation Day*). Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat dan mendorong pelemahan indeks dolar AS terhadap mata uang negara utama (DXY), penurunan *yield* US Treasury (UST), koreksi pada aset-aset berisiko dan berkontribusi pada pelemahan nilai tukar regional, termasuk mata uang Rupiah.

Pada libur Lebaran 2025, ketidakpastian di pasar keuangan global mendorong pelemahan tajam kurs NDF USD/IDR *offshore* dan perlu direspons dengan cepat dan tepat. Kurs NDF melemah sebesar 2,33% ke Rp17.005 pada 4 April 2025. NDF yang merupakan kontrak derivatif valuta asing dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai tanpa pertukaran valas secara fisik perlu mendapat perhatian karena pergerakannya mencerminkan ekspektasi pasar terhadap nilai tukar. Pergerakan NDF USD/IDR yang terjadi di luar jam transaksi pasar domestik, khususnya saat penutupan pasar New York, secara historis memengaruhi arah pembukaan Rupiah di pasar *spot* pada hari berikutnya, terutama saat pasar domestik tutup dan likuiditas rendah.

Hubungan erat antara *closing* NDF *offshore* dan *opening spot* domestik menjadi pertimbangan Bank Indonesia mengembangkan inovasi intervensi NDF *offshore* dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam pelaksanaannya, intervensi NDF *offshore* didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu instrumen,

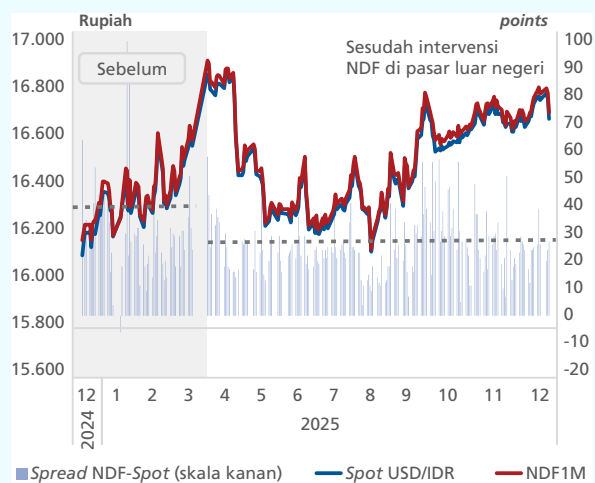
timing, dan volume intervensi. Dari sisi instrumen, intervensi melalui transaksi NDF *offshore* diarahkan untuk memengaruhi ekspektasi pasar yang berlebihan terhadap pergerakan nilai tukar melengkapi peran intervensi *spot* dan DNDF. Dari sisi *timing*, intervensi NDF *offshore* dilakukan terutama di luar jam perdagangan pasar valas domestik untuk mengelola pergerakan kurs sebelum pasar dibuka. Sementara dari sisi volume intervensi, transaksi NDF *offshore* dan DNDF dilakukan dalam volume yang memadai sehingga pergerakan nilai tukar tetap berada pada rentang yang mencerminkan kondisi fundamental.

Pelaksanaan intervensi NDF *offshore* secara umum mampu mendukung strategi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan pasar global. Pergerakan NDF *offshore* dan *spot* USD/IDR (Grafik B2.1.1.) pada awal April 2025 saat periode libur Lebaran menunjukkan terjadinya peningkatan transaksi NDF dan diikuti tekanan pada nilai tukar Rupiah. Setelah intervensi NDF dilakukan pada 7 April 2025, pasar merespon dengan cepat melalui penguatan Rupiah ke kisaran Rp16.600 dan diikuti penurunan volatilitas transaksi NDF. Pada periode berikutnya, intervensi NDF *offshore* tetap dilakukan sehingga mendukung stabilnya nilai tukar Rupiah.

Pelaksanaan intervensi NDF *offshore* juga memungkinkan pemantauan pergerakan NDF secara berkesinambungan. Bank Indonesia dapat memantau perkembangan NDF *around the clock* dan *around the world* di pasar Asia, Eropa, dan New York setelah implementasi strategi ini. Selain itu, strategi ini turut mendukung upaya untuk terus menjaga kecukupan cadangan devisa. Secara



Grafik B2.1.1. Transaksi *Spot* USD/IDR dan NDF



Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

keseluruhan, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar melalui transaksi NDF *offshore* melengkapi strategi stabilisasi nilai tukar dengan instrumen yang sudah ada sehingga berkontribusi pada terjaganya nilai tukar Rupiah di tengah dinamika pasar global yang makin *volatile*.



Boks 2.2.

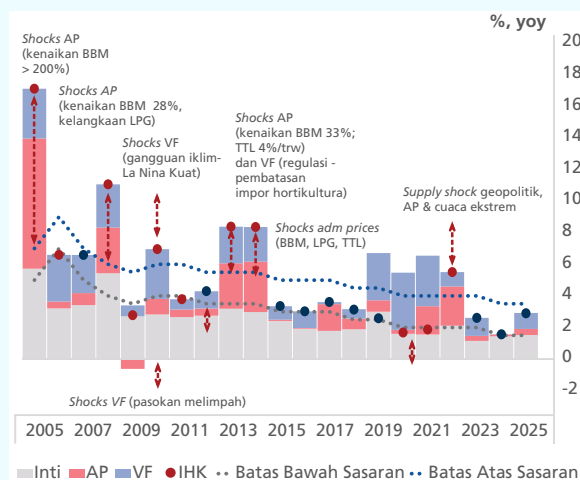
Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Menjaga Stabilitas Harga

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2025 tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ didukung oleh terjaganya berbagai komponen inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi IHK pada 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran meskipun lebih tinggi dari inflasi 2024 sebesar 1,57% (yoy)-(Grafik B2.2.1). Perkembangan ini ditopang inflasi inti yang terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy) dengan andil terhadap inflasi IHK sebesar 1,53% (yoy). Secara spasial, inflasi IHK yang terkendali tecermin dari sebagian besar provinsi yang berada dalam rentang sasaran nasional.

Di tengah kondisi inflasi IHK 2025 yang terjaga dalam sasaran tersebut, perkembangan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*, VF) perlu mendapat perhatian. Inflasi VF pada 2025 tercatat 6,21% (yoy) meningkat dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar 0,12% (yoy). Komoditas yang memberikan andil besar pada inflasi VF adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan serta input harga produksi.

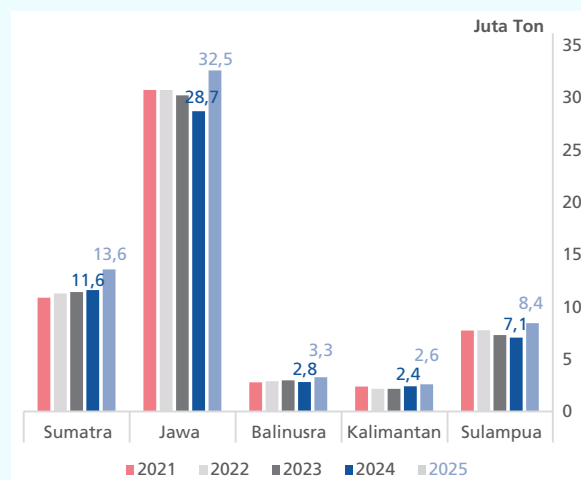
Berbagai sinergi kebijakan pengendalian inflasi VF ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat-Daerah pada 2025 melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID). Sinergi tersebut secara umum mencakup upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta upaya memperkuat efektivitas komunikasi dalam menjaga ekspektasi pelaku ekonomi. Dari sisi keterjangkauan harga strategi pengendalian harga pangan terus diperkuat efektivitasnya. Dari sisi menjaga pasokan, berbagai upaya telah ditempuh. Produksi pangan pada 2025 meningkat dibandingkan dengan produksi 2024 seperti tecermin pada komoditas padi dan hortikultura. Berdasarkan data BPS, produksi beras pada 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2024, terutama pada wilayah Jawa sebagai sentra utama dengan kontribusi lebih dari separuh total produksi beras nasional (Grafik B2.2.2.). Sementara dari sisi kelancaran distribusi diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi perdagangan, termasuk melalui perbaikan konektivitas dan penguatan kerja sama antardaerah (KAD).

Grafik B2.2.1. Perkembangan Disagregasi Inflasi



Sumber: BPS, diolah

Grafik B2.2.2. Produksi Beras Wilayah



Sumber: BPS, diolah



Rapat Koordinasi TPIP-TPID dan Penguatan GNPIP Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam rangka Memperkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah.

Ke depan, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga akan terus diperkuat. Penguatan sinergi menjadi sangat penting guna memitigasi risiko yang dapat meningkatkan harga pangan seperti perubahan cuaca dan iklim, termasuk bencana alam, dan peningkatan permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta

kenaikan permintaan musiman pada periode menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Dalam kaitan ini, optimalisasi implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional perlu terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah untuk memastikan stabilitas harga beras dan komoditas pangan utama lainnya.



Boks
2.3.

Akselerasi Transaksi QRIS: Mendorong Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Inklusi Keuangan

Digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi katalisator dalam transformasi sektor ekonomi dan keuangan domestik.

Layanan keuangan berbasis teknologi, seperti *e-wallets*, *mobile banking*, dan pembayaran berbasis kode QR, memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Pada November 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,66 miliar transaksi atau tumbuh 41,12% (yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,91% (yoy) dan 16,11% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 143,64% (yoy). Studi Chen et al. (2019) menemukan bahwa *platform* pembayaran digital mendorong peningkatan konsumsi melalui kemudahan bertransaksi, pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Salah satu dimensi penting dari digitalisasi sistem pembayaran adalah dampak positifnya terhadap inklusi keuangan. Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2018), akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal yang dimediasi teknologi digital membuka peluang bagi kelompok masyarakat *unbanked*, seperti pelaku usaha mikro dan rumah tangga di wilayah pedesaan. Di Indonesia, urgensi ini tecermin dari masih besarnya populasi *unbanked*, di mana sekitar 44% penduduk dewasa belum memiliki rekening keuangan formal pada 2024, sehingga peningkatan adopsi pembayaran digital oleh konsumen dan UMKM menjadi jalur strategis dalam mempercepat perluasan inklusi keuangan nasional.

QRIS mengakselerasi pembayaran digital dan berperan sebagai pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. QRIS merupakan suatu standar yang dibangun untuk memfasilitasi berbagai instrumen dan sumber dana pembayaran, baik *offline* maupun *online* agar dapat saling interkoneksi dan *interoperable*. Lebih dari itu, melalui fasilitasi proses *onboarding merchant* QRIS, pelaku UMKM memperoleh akses terhadap akun pembayaran digital sehingga membuka peluang mereka untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Hal ini juga memperluas peluang pemanfaatan layanan keuangan lain, seperti pembiayaan dan investasi, seiring semakin tersedianya catatan transaksi elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk menilai profil kelayakan keuangan dari UMKM.

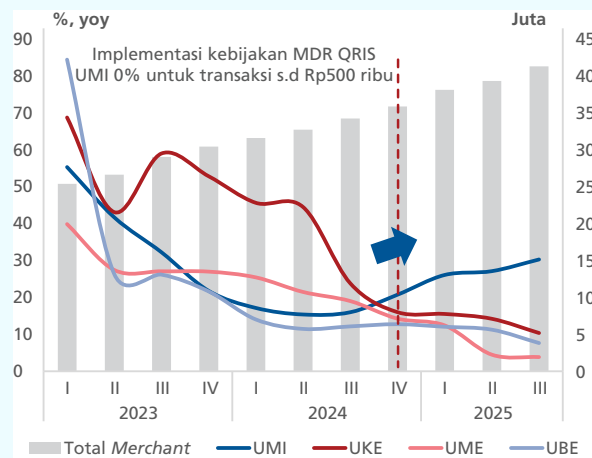
Transaksi QRIS didominasi oleh transaksi UMKM, dengan volume dan nilai transaksi yang semakin meningkat. *Merchant* UMKM mendominasi transaksi QRIS, mencapai 40,92 juta atau 95,74% dari total *merchant* QRIS pada triwulan IV 2025. Usaha mikro (UMI) memiliki pangsa terbesar dibanding *merchant* lainnya (62,72%), diikuti usaha kecil (UKE)-(27,94%) dan usaha menengah UME (5,08%). Dari sisi volume transaksi, UMKM mendominasi dengan total transaksi mencapai 3,74 miliar atau 72,42% dari total transaksi QRIS dengan pangsa terbesar adalah UKE (35,19%), diikuti UME (19,36%) dan UMI (17,87%). Sejalan dengan perkembangan volume transaksi, nominal transaksi UMKM mencapai Rp332,68 triliun dengan pangsa 72,17% dari total transaksi QRIS. UKE mendominasi nominal transaksi dengan pangsa sebesar 35,90%, diikuti UME



(22,92%), dan UMI (13,34%). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, volume maupun nominal transaksi *merchant* UMKM QRIS pada triwulan IV 2025 tercatat meningkat. Volume transaksi UMKM QRIS meningkat 125,16%. Peningkatan khususnya terjadi pada UKE dengan pertumbuhan mencapai 166,23%, diikuti UMI (162,47%) dan UME (59,49%). Nominal transaksi UMKM QRIS juga meningkat (96,26%) yang didominasi oleh transaksi UKE (147,08%), diikuti UMI (126,80%) dan UME (40,14%).

Volume transaksi per *merchant* UMKM QRIS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Volume transaksi per *merchant* UMKM QRIS tercatat tumbuh 82,78% pada triwulan IV 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan khususnya terjadi pada UKE (141,56%), diikuti UMI (97,69%) dan UME (61,02%). *Ticket size* UMKM tercatat semakin ritel sejalan dengan perluasan *merchant* QRIS, khususnya UMI. *Ticket size* UMKM QRIS pada triwulan IV 2025 sebesar Rp88.716, turun 12,83% (yoy). Penurunan *ticket size* terutama terjadi pada UMI yang tercatat turun sebesar 13,59%, (yoy), yakni dari Rp76.928 menjadi Rp66.474. Kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) UMI 0% pada 1 Desember 2024 diindikasikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tren penurunan *ticket size* UMKM, khususnya UMI (Grafik B.2.3.1). Hal ini sejalan dengan meluasnya *merchant* UMI pascakebijakan tersebut.

Grafik B2.3.1. Perluasan *Merchant* QRIS Terus Berlanjut Terutama UMI Pascakebijakan MDR 0%



Keterangan: Untuk transaksi di atas Rp500 ribu
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ke depan, penguatan ekosistem QRIS terus dilakukan untuk memperluas adopsi pembayaran digital secara lebih merata sehingga makin mendorong inklusi keuangan. Upaya tersebut perlu didukung oleh sinergi kebijakan antara otoritas, industri, dan pemangku kepentingan terkait, baik dalam aspek regulasi, infrastruktur, maupun literasi digital. Dengan fondasi tersebut, sistem pembayaran digital tidak hanya berperan sebagai *enabler* efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.